



FUNGSI KOORDINASI PEMERINTAH KELURAHAN ANDIR DAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TERKAIT PENANGANAN BANJIR DI KELURAHAN ANDIR KECAMATAN BALEENDAH KABUPATEN BANDUNG

Dera Izhar Hasanah¹ & Rendy Adiwilaga², Hena Nurjanah³

*¹Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Bale Bandung, Jawa Barat, Indonesia
zifanigabriela@yahoo.com*

*²Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Bale Bandung, Jawa Barat, Indonesia
rendyadiwilaga@gmail.com*

Received: 1 Februari 2021; Revised: 1 Maret 2021; Accepted: 13 Maret 2021; Published: April 2021; Available online: April 2021.

ABSTRAK

Penelitian ini disusun untuk menganalisis penanganan banjir di Kelurahan Andir, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung melalui perspektif pemerintahan secara keilmuan. Peneliti menggunakan teori Terry terkait koordinasi dan menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi. Informan yang diambil oleh peneliti adalah Lurah Kelurahan Andir, Sekretariat Kelurahan Andir, Kasi Pemberdayaan Masyarakat, TNI Sektor 7 Citarum Harum, Masyarakat RW 06 dan RW 09, Kepala Badan Penganggulangan Bencana Daerah, serta bagian Umum dan Kepegawaian Kelurahan Andir. Andir sendiri merupakan wilayah di Kabupaten yang rutin terkena banjir tahunan. Kelurahan Andir dan BPBD telah berkoordinasi untuk penanganan banjir di wilayah kelurahan Andir, salah satu tujuan BPBD adalah menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran koordinasi belum sepenuhnya berjalan baik karena masih adanya ketidaksesuaian mengenai penanganan banjir yang ada saat ini. Spesifikasi pekerjaan program belum maksimal terlihat dari masih terjadinya duplikasi pekerjaan, peningkatan pemahaman, pembinaan dan sosialisasi masyarakat perlu ditingkatkan untuk lebih optimal lagi.

Kata Kunci: Koordinasi, Penanggulangan Bencana, Banjir

PENDAHULUAN

Koordinasi mempunyai arti yang sangat penting terutama diantara aparatur pemerintah dalam era otonomi daerah seperti saat ini. Hal tersebut disebabkan karena sebagian besar dari program pembangunan mempunyai sifat antar sektor yang pelaksanaannya melibatkan lebih dari satu instansi pemerintah. Keberhasilan pelaksanaan program pada akhirnya ditentukan oleh kerjasama yang baik antara instansi yang terlibat dan disinilah koordinasi antar instansi memegang peranan penting. Keseluruhan pelaksanaan pembangunan di daerah harus dikoordinasikan dan dilaksanakan secara serasi dan selaras sehingga memberi manfaat yang sebesar-besarnya dan memberikan sumbangan yang nyata dalam tujuan pembangunan.

Pemerintah pada hakekatnya merupakan suatu organisasi yang sangat besar yang terdiri dari berbagai unsur aparatur pemerintah sebagai bagiannya yang harus bergerak sebagai kesatuan yang bulat berdasarkan pendekatan (*system approach*). Oleh sebab itu, di samping peranannya dalam

administrasi pada setiap unsur aparatur pemerintah, koordinasi juga mempunyai arti yang menentukan dalam administrasi sebagai satu keseluruhan aparatur pemerintah. Adanya koordinasi yang baik diantara unsur aparatur pemerintah, diharapkan akan lebih terjamin pencapaian tujuan pemerintah secara keseluruhan.

Koordinasi hanya mungkin akan efektif apabila adanya kesadaran dan kesediaan sukarela dari semua anggota organisasi atau pimpinan-pimpinan organisasi untuk melakukan kerja sama antar instansi ke dalam pelaksanaan kerja dibawah pengarahannya seorang yang mempunyai kewenangan fungsional tertentu. Untuk melihat kemampuan seorang atasan sebagai pemimpin dalam melakukan koordinasi dilihat dari besar kecilnya jumlah bawahan yang ada dalam tanggung jawabnya, yang dikenal sebagai rentan manajemen. Koordinasi dibutuhkan sekali oleh para pegawai nya, sebab tanpa koordinasi setiap pegawai tidak mempunyai pegangan mana yang harus diikuti, sehingga akan merugikan organisasi itu sendiri. Dengan koordinasi diharapkan

keharmonisan atau keserasian seluruh kegiatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan sehingga tiap departemen atau lembaga menjadi seimbang dan selaras.

Koordinasi juga dibutuhkan dalam penanganan lingkungan hidup, salah satu permasalahan lingkungan hidup yang sering kali menjadi sorotan masyarakat saat ini ialah mengenai banjir. Banjir merupakan bencana alam yang terjadi di kawasan yang banyak dialiri oleh aliran sungai. Sedangkan secara sederhana, banjir didefinisikan sebagai hadirnya air suatu kawasan luas sehingga menutupi permukaan bumi kawasan tersebut. Banjir adalah aliran air yang relatif tinggi, dan tidak tertampung oleh alur sungai atau saluran (Suparta 2004).

Bencana alam disuatu wilayah memiliki implikasi secara langsung terhadap masyarakat diwilayah tersebut. Partisipasi masyarakat untuk mengurangi dan menghindari resiko bencana penting dilakukan dengan cara meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat (Suryati dkk, 2010) menjelaskan bahwa masyarakat mempunyai pihak yang memiliki pengalaman langsung dalam kejadian bencana sehingga pemahaman yang dimiliki menjadi modal bagi pengurangan resiko bencana. Dalam konteks manajemen bencana alam respon masyarakat terhadap bencana sangat penting

untuk dipahami (Marfai dkk, 2008).

Kabupaten Bandung adalah salah satu wilayah di Cekungan Bandung, Jawa Barat, yang rentan terhadap bahaya banjir. Kondisi ini dipengaruhi oleh keberadaan sungai Citarum sebagai sumber bahaya banjir. kondisi ini dipengaruhi oleh keberadaan sungai Citarum sebagai sumber bahaya banjir dan pengaruh pengelolaan disekitar Daerah Aliran Sungai (DAS). Faktor-faktor yang memperbesar kerentanan terhadap bencana banjir diantaranya perubahan guna lahan kawasan lindung disekitar DAS Citarum, penurunan permukaan tanah di Cekungan Bandung, bertambahnya laju sedimentasi dialiran sungai, tumpukan sampah di sungai yang menghambat aliran air, dan bertambahnya kepadatan jumlah penduduk disekitar aliran sungai Citarum yang signifikan pada lebih dari satu dekade terakhir (Abidin et al., 2013; Wangsaatmaja et al., 2006).

Sebagai dampak bertambah besarnya pengaruh faktor-faktor tersebut dari tahun ke tahun, bencana banjir tidak dapat dihindari oleh masyarakat yang bermukim di sekitar daerah aliran sungai Citarum. Hingga saat ini, bencana banjir tahun selalu terjadi di wilayah daerah aliran Citarum, terutama Kecamatan Baleendah. Kecamatan Baleendah merupakan Kecamatan yang

menjadi langganan bencana banjir pada tahun 2011 mendapatkan bahwa 94% (sekitar 878,8 Ha) wilayah Kecamatan Baleendah berpotensi terkena banjir setiap tahun.

Kecamatan Baleendah memiliki kondisi morfologi relatif datar dengan kemiringan lereng 0%-3% yang artinya Kecamatan Baleendah merupakan dasar dari danau Bandung Purba, sehingga pada saat terjadi hujan dengan intensitas yang cukup tinggi Kecamatan Baleendah dapat menimbulkan genangan banjir, hal tersebut disebabkan oleh meluapnya air yang ada disungai, baik disebabkan oleh sedimentasi, maupun kurangnya kapasitas sungai. Selain permasalahan dari saluran sungai di Kecamatan Baleendah adapun permasalahan lain yang menimbulkan banjir yaitu disebabkan oleh alih fungsi lahan serapan air yang menjadi bangunan, baik di hulu sungai, maupun di daerah pinggiran sungai yang melewati Kecamatan Baleendah dimana seharusnya tidak di perbolehkan adanya pembangunan.

Di Kecamatan Baleendah banjir yang menggenang terparah tepatnya di Kelurahan Andir. Rata-rata air yang menggenang tingginya mencapai 20 sentimeter atau semata kaki orang dewasa.

Dampak banjir yang semakin meluas tersebut, mempengaruhi pada kelangsungan ekonomi masyarakat. Perekonomian di lokasi banjir lumpuh total, terutama di kawasan Andir. Berdasarkan observasi peneliti, diketahui bahwa nyatanya para pedagang rugi mencapai puluhan juta rupiah akibat banjir yang berlangsung.

Tabel 1.1
Data Korban Bencana Banjir Di Kelurahan Andir Pada Tanggal 3 Maret 2020 Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung

No	Lokasi		Jumlah Korban Banjir					Keting air (c
	Rt	Rw	Jumlah KK	Jiwa	Balita	Lansia	Ibu Hamil	
1	1 s/d 12	01	707	2.326	-	-	-	30-1
2	1 s/d 13	02	930	3.440	-	-	-	30-1
3	1 s/d 6	03	223	487	-	-	-	35-10
4	1 s/d 5	05	463	813	-	-	-	35-1
5	1 s/d 6	06	444	1.617	-	-	-	50-1
6	1 s/d 12	07	582	2.019	-	-	-	60-1
7	1 s/d 5	08	231	539	-	-	-	40-1
8	1 s/d 8	09	648	2.398	-	-	-	100-1
9	1 s/d 6	10	587	1.023	-	-	-	45-1
10	1 s/d 8	13	377	1.311	-	-	-	100-1
Jumlah			5.192	15.973	-	-	-	-

sumber: Data Kelurahan Andir, 2020

Tabel 1.2
Kondisi Pengungsi Banjir di Baleendah

No	Lokasi Pengungsi	Jumlah Pengungsi	Kebutuhan
1	Inkanas Baleendah	687 kk	Bahan Makanan Pokok
2	Mesjid-mesjid	1.869 Jiwa	Air Mineral
3	Rumah Saudara	23 Balita	Obat
4	-	91 Lansia	Alat-alat Pembersih rumah

sumber: Data Kelurahan Andir, 2020

Untuk itu pemerintah wilayah pada dasarnya terhadap penanganan banjir harus berinisiatif, baik dalam perencanaan maupun penanganan. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan terkait penanganan banjir diperlukan koordinasi dan kesungguhan dari aparat dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan dan menggerakkan masyarakat untuk turut serta berperan di dalamnya.

Meningkatkan keterpaduan dalam penanganan banjir melalui pola koordinasi antara Kelurahan Andir dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sepenuhnya belum dapat berjalan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor misalnya, adanya kecenderungan aparat dalam bekerja sering muncul perbedaan dan penafsiran dalam melihat suatu kebijakan, kurangnya komunikasi antar aparat Kelurahan Andir dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah baik secara vertikal maupun horizontal sehingga terkesan bekerja secara sendiri-sendiri, dan kurangnya pengetahuan aparat pemerintah mengenai fungsi koordinasi dan

kesadaran aparat dalam mengaplikasikan fungsi koordinasi dengan baik. Akibatnya penanganan belum berjalan dengan baik, terarah dan efektif.

Harus dipahami bahwa aparat Kelurahan Andir dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menjalankan fungsinya dituntut mampu mengkoordinasikan perencanaan pembangunan agar kiranya dapat seiring dengan pelaksanaan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Selain itu, juga diperlukan koordinasi yang baik antar aparat pemerintah Kelurahan Andir dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama antar Kelurahan Andir dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam masalah program-program ataupun rencana-rencana penanganan banjir, sering kali menjadi hambatan di dalam pelaksanaan seperti pembuatan fasilitas umum seperti tempat sampah, pembangunan saluran air, maupun melalui program-program pemerintah belum berjalan secara maksimal terlihat dari lambatnya pengerjaan, ketidakpastian waktu pelaksanaan sehingga menimbulkan pertanyaan dimasyarakat bagaimana koordinasi Kecamatan dan Kelurahan dengan instansi terkait dan masyarakat.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Masih belum optimalnya koordinasi antar pegawai Kelurahan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah hal ini dilihat dari hasil wawancara peneliti melalui pihak Kelurahan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanganan banjir.
2. Kurangnya pengetahuan tentang kesiapan dalam hal mitigasi banjir dikarenakan faktor ketidaktahuan masyarakat, hal ini dilihat dari banyaknya masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan ke aliran sungai Citarum.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang dapat digunakan yaitu:

1. Bagaimana fungsi koordinasi pemerintah Kelurahan Andir dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanganan banjir dikaji dengan

menggunakan teori Koordinasi Terry?

Kerangka Pemikiran

Dalam rangka memenuhi ketentuan yang tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 41 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 53 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung. Kantor Badan Penanggulangan Bencana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang memiliki tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan,

mengkoordinasikan dan mempertanggung jawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penanggulangan bencana.

Kemudian, Kelurahan menjadi bagian dari pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini dikarenakan berdasarkan kedudukannya dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kelurahan bukan lagi merupakan perangkat daerah, namun Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan. Peraturan Pemerintah ini disusun untuk menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan dan Peraturan Pemerintahan Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan.

Untuk mengkaji koordinasi keduanya, penulis menggunakan teori koordinasi menurut Terry (2006: 126). Adapun unsur-unsur tersebut ialah: a) Unsur-unsur sinkronisasi yang teratur (*orderly synchronization of effort*), sinkronisasi adalah suatu usaha untuk menyesuaikan, menyelaraskan kegiatan-kegiatan, tindakan-tindakan, unit-unit, sehingga diperoleh keserasian dalam pelaksanaan tugas atau kerja (Hasibuan, 2011: 86).

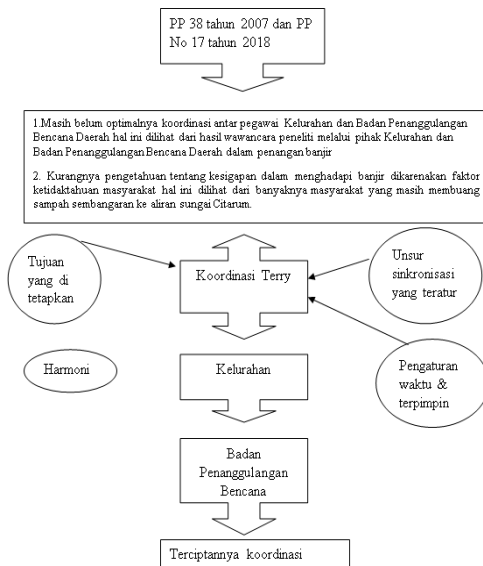
Kemudian, b) Pengaturan waktu (*timing*) dan terpimpin(*directing*), menunjukkan penentuan waktu dan perkiraan masa pengerjaan dari keseluruhan

kegiatan. Sedangkan terpimpin (*directing*) yaitu kegiatan yang berhubungan dengan usaha-usaha bimbingan, memberikan arahan, saran-saran, perintah-perintah, instruksi-instruksi agar tujuan yang telah ditentukan semula dapat dicapai.

Lalu, c) Harmonis(*harmonius*), yakni adanya saling pengertian dan penyesuaian antara kedua belah pihak, satu sama lain saling memberikan keuntungan dan merasa senang. Dan terakhir d) Tujuan yang ditetapkan (*stated objective*), adalah hasil yang diinginkan yang melukiskan skop yang jelas, serta memberikan arah kepada usaha-usaha seorang manajer. Tujuan yang ingin dicapai selalu ditetapkan dalam suatu rencana (*plan*), karena itu hendaknya tujuan ditetapkan jelas, realistis dan cukup menantang untuk diperjuangkan berdasarkan pada potensi yang dimiliki.

Dalam kerangka pemikiran diatas, maka penulis mencoba membuat alur berfikir seperti dibawah ini "Fungsi Koordinasi Pemerintah Kelurahan Andir Dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Terkait Penanganan Banjir di Kelurahan Andir".

Bagan 1 Kerangka Pemikiran



Sumber: olahan penulis, 2020

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistik dan dengan suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh 3 (tiga) sumber yaitu:

1. Data primer: diperoleh dari pihak Kelurahan

Andir dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

2. Data Sekunder diperoleh dari Literatur, dokumen-dokumen, aturan perundang-undangan dan sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
3. Data Tersier diperoleh melalui kliping dan internet.

Teknik analisis dpada penelitian ini dimulai dari pengumpulan data serta menganalisisnya secara akurat diteruskan kepada teknik penyusunan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif, maka hasil atau data yang diperoleh penulis dikumpulkan dan dikaji kemudian diolah secara sistematis dan akurat dengan sebelumnya melalui metode observasi, wawancara, dokumentasi, pengolahan data, mengklarifikasi hingga pada sebuah kesimpulan sebagai pemecahan masalah pada penelitian ini.

PEMBAHASAN

Unsur-Unsur Sinkronisasi Yang Teratur

Unsur-unsur sinkronisasi yang teratur dalam koordinasi menurut Awaluddin Djamin, sinkronisasi adalah suatu usaha untuk menyesuaikan, menyelaraskan kegiatan-kegiatan, tindakan-tindakan, unit-unit, sehingga diperoleh keserasian dalam pelaksanaan tugas atau kerja. Faktor unsur-unsur sinkronisasi dianggap faktor yang amat penting, karena menjembatani koordinasi antar pihak Kelurahan dan pihak Badan Penanggulangan Bencana, sehingga dapat diketahui bagaimana fungsi koordinasi pemerintah Kelurahan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanganan banjir apakah berjalan efektif dan efisien tanpa adanya yang dirugikan. Koordinasi yang efektif baru akan terjadi apabila pihak intansi terkait mengetahui apa yang harus mereka kerjakan, dan hal itu hanya dapat diperoleh dari unsur-unsur sinkronisasi yang teratur.

Salah satu koordinasi antara pihak Kelurahan dan Badan Penanggulangan Bencana dalam penangan banjir yaitu dengan adanya upaya membuat kegiatan-kegiatan dan tindakan-tindakan dalam pembagian tugas. Pada Pembahasan ini peneliti akan mendeskripsikan bagaimana koordinasi program kegiatan Kelurahan andir dan Badan

Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanganan banjir, dengan tabel dibawah ini:

Tabel 3
Program Kegiatan

Program Kegiatan Kelurahan Andir	Program Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pemberian bantuan makanan kepada masyarakat melalui pengurus daerah setempat seperti RT dan RW.	Pemberian bantuan makanan yang disalurkan kepada pihak Kelurahan seperti mie instan, beras, air mineral dll.
Mengadakan dapur umum di kelurahan yang di laksanakan oleh ibu-ibu pkk warga yang terkena banjir.	Pemberian bantuan seperti perahu karet sebagai alat transportasi warga Kelurahan Andir untuk mengungsi.
Mendata warga-warga yang mengungsi dan mendata warga-warga yang terkena genangan banjir paling parah.	Memberitahukan dan menyiapkan tempat pengungsian untuk warga Kelurahan Andir yang terkena banjir.
Memberi peringatan kepada warga jika banner akan segera tiba agar warga hati-hati dan tetap waspada.	Memberitahukan dan memberi peringatan kepada pihak Kelurahan jika banjir akan segera tiba.

Sumber: olahan penulis, 2020

Hal tersebut peneliti dapatkan dari hasil wawancara

dengan Ibu Yuli sebagai kasi pemberdayaan di Kelurahan Andir yang menyatakan:

“Seperti yang kita ketahui bahwa di Kelurahan Andir ini sering terjadi bencana banjir yang merendam beberapa Rw dikarenakan cekungan tanah di wilayah sekitar dan tumpukan sampah yang menghambat aliran sungai maka dari itu sebagai salah satu upaya penanganan banjir salah satunya dengan diadakannya berbagai kegiatan dan berkoordinasi dengan pihak badan penanggulangan bencana daerah seperti pembagian tugas kegiatan yang akan dilaksanakan”.

Dari pernyataan sebagaimana dikemukakan dapat peneliti kemukakan bahwa menyangkut unsur-unsur sinkronisasi yang teratur yang dijalankan oleh Kelurahan Andir dapat berjalan dengan baik terlihat dari berbagai usaha pelaksanaan kegiatan dalam tindakan-tindakan dalam pelaksanaan tugas.

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Entin masyarakat Kelurahan Andir Rw 06 terkait dengan kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan tugas kerja yang menyatakan:

“Sejauh ini pihak Kelurahan Andir dan pihak BPBD bisa melaksanakan kegiatan sesuai tugasnya hal ini dilihat dari kompaknya pemberian bantuan seperti mie instan, beras, minyak dan air minum kepada warga yang kebanjiran”.

Dari hasil wawancara di atas terkait dengan kegiatan Kelurahan Andir dan pihak BPBD sudah berkoordinasi dengan cukup baik dikarenakan kompak dalam menyelesaikan tugas masing-masing.

Pihak Kelurahan Andir dan BPBD berkoordinasi dengan baik melalui tindakan-tindakan yang dilakukan salah satunya dengan cara BPBD menyuruh pihak Kelurahan Andir memberitahukan kepada masyarakat apabila banjir akan segera datang.

Hal ini peneliti lihat melalui wawancara dengan Ibu Ema Ketua RW 06 yang menyatakan:

“Sejauh ini tentang tindakan-tindakan dari Kelurahan dan BPBD mengenai peringatan akan datangnya banjir selalu diberikan himbauan kepada masyarakat agar berhati-hati karena banjir akan segera datang misalnya menyuruh mematikan listrik saat banjir akan

datang dan disuruh segera mengungsi ketempat pengungsian namun terkadang masih ada masyarakat yang ngeyel”

Dari hasil wawancara di atas terkait dengan kegiatan, Kelurahan Andir dan pihak BPBD sudah berkoordinasi dengan cukup baik dilihat dari cara melakukan tindakan-tindakan kegiatan yang kompak terlihat dari cara Kelurahan dan BPBD dalam memberitahukan himbuan kepada masyarakat namun masih ada masyarakat yang mengabaikan peringatan yang sudah di umumkan.

Pengaturan Waktu

Dalam Koordinasi Terry (2006: 126) faktor pengaturan waktu dan terpinpin mempunyai peranan dalam koordinasi, karena bagaimanapun dibutuhkan penentuan waktu dan perkiraan masa pengerjaan dari keseluruhan kegiatan sedangkan terpinpin kegiatan yang berhubungan dengan usaha-usaha bimbingan, memberikan arahan, saran-saran, perintah-perintah, intruksi-intruksi agar tujuan yang telah ditentukan semua dapat dicapai.

Koordinasi tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari pengaturan waktu dan terpinpin yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas pengaturan waktu dan terpinpin berkaitan dengan keterampilan, dedikasi profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas

berkaitan dengan jumlah pengaturan waktu dan terpinpin apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan data ketetapan pelaksanaan program mulai dari target yang dilaksanakan dan sudah dilaksanakan. Berikut merupakan data ketetapan pelaksanaan program:

Tabel 4
Ketetapan Pelaksanaan Program

Target Program	Target Yang Sudah Terlaksana
Penambahan tempat pengungsian yang di fasilitasi MCK dan dapur umum	Sudah berjalan dari awal tahun 2018
Pemulihan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum	Sudah berjalan dari awal tahun 2018
Pembuatan Floodway	Sudah berjalan dari bulan april 2019
Pembuatan Danau Retensi	Sudah berjalan dari awal tahun 2020
Pembentukan Panitia Banjir Antar Rw	Sudah berjalan dari awal tahun 2020

Bersadarkan tabel diatas sudah terdapat ketetapan pelaksaaan program yang di targetkan dan sudah mencapai target salah satunya penambahan tempat pengungsian yang di fasilitasi MCK dan dapur umum target ini sudah berjalan di awal tahun 2018 dan sudah mecapai target 100% , program pemulihan aliran daerah sungai sudah berjalan di awal tahun 2018 target sudah mencapai 80% dikarenakan warga banyak yang masih membuang sampah sembarangan, pembuatan floodway sudah berjalan di bulan april dan sudah mencapai target

80% , pembuatan danau retensi di Andir yang sudah dilaksanakan awal tahun 2020 sudah mencapai 70% dikarenakan masih menunggu pelelangan tanah warga di sekitar dan terakhir program pembentukan ketua banjir antar Rt dan Rw sudah mencapai 100% atau bisa dikatakan memenuhi target.

Ketika peneliti tanyakan kepada Bapak Saef selaku Lurah di Kelurahan Andir yang menyatakan:

"Sejauh ini pihak BPBD selalu berkoordinasi dengan memberikan intruksi-intruksi dan arahan-arahan seperti hal nya yang harus dilakukan sebelum banjir maupun saat terjadi banjir dan setelah banjir seperti halnya program yang dijalankan."

Berdasarkan hasil wawancara lebih lanjut ketika peneliti tanyakan dengan pertanyaan yang sama kepada Ibu Yuli Rosidah sebagai Kasi Pemerintahan yang menyatakan:

"Ya BPBD berkoordinasi dengan cara menyuruh para pengurus dari Kelurahan semisalnya Rt atau Rw untuk membentuk tim penanggulangan banjir di tingkat warga salah satunya mengangkat penanggung jawab banjir ."

Sementara itu peneliti juga menanyakan terkait dengan intruksi-intruksi BPBD melalui Kelurahan kepada Ibu Nining sebagai masyarakat RT 07 RW 06 yang menyatakan:

"Kelurahan dan BPBD selalu memberikan intruksi kepada masyarakat terkait dengan menyuruh membersihkan lingkungan sekitar terutama di saluran air atau selokan dari timbunan sampah dan menyuruh masyarakat jika mengungsi ketempat yang mempunyai fasilitas dapur dan MCK yang sudah disediakan oleh pihak Kelurahan dan pihak BPBD".

Dari hasil wawancara dengan Lurah, Kasi Pemberdayaan dan Masyarakat bahwa memang untuk intruksi-intruksi maupun saran-saran sudah terlaksana dengan cukup baik karena intruksi-intruksi di jalankan sesuai dengan perintah yang di tetapkan.Seperti hal program yang sudah disediakan oleh pihak Kelurahan dan pihak BPBD seperti memfasilitasi tempat pengungsian yang difasilitasi oleh dapur umum dan kamar mandi atau MCK.

Harmonis

Faktor harmonis dalam unsur-unsur koordinasi terry

(2006: 126) menurut Glenn Griswold dalam Kustadi Suhandang (2004: 45-46) artinya saling pengertian dan penyesuaian antara kedua belah pihak, satu sama lain saling memberikan keuntungan dan merasa senang. Apabila implementor memiliki harmonis yang baik, maka dia akan dapat menjalankan koordinasi dengan baik seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda misalnya tidak adanya sikap saling pengertian dan tidak adanya penyesuaian kedua belah pihak atau bahkan merugikan salah satu pihak maka proses koordinasi tidak menjadi efektif. Apabila implementor memiliki sikap yang baik, maka dia akan menjalankan koordinasi dengan baik seperti apa yang diinginkan.

Untuk menjadikan koordinasi secara harmonis perlu meningkatkan pembangunan komunikasi informal misalnya melakukan komunikasi atau pendekatan tidak hanya dalam konteks rapat melainkan diluar kegiatan. Hal ini sangat berguna untuk meningkatkan bonding antara pihak Kelurahan Andir dan Pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang didapatkan terkait dengan indikator Harmoni, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Akhmad Djohara

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana yang menyatakan :

“Sejauh ini ada koordinasi yang saling pengertian dan saling memberi keuntungan baik pihak badan penanggulangan bencana daerah ataupun pihak kelurahan karena sejauh ini pihak badan penanggulang bencana daerah ataupun kelurahan tidak merasa dirugikan.”

Berdasarkan hasil penelitian diatas peneliti menyimpulkan bahwa sejauh ini pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kelurahan sejauh ini berkoordinasi dengan baik karena sejauh ini kedua pihak sama-sama saling memberikeuntungan dan tidak merasa dirugikan karena terjalinnya komunikasi yang cukup baik antara pihak Kelurahan dan pihak Badan Penanggulangan Bencana.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak Kelurahan terkait pertanyaan yang sama dengan Bapak Abdul hakim sebagai Sekterteriat mengatakan:

“Bila dilihat sejauh ini ya memang saling menguntungkan akan tetapi terkadang pihak Badan Penanggulang Bencana masih kurang optimal dalam perdistribusian bahan sandang sehingga hal ini mengakibatkan kebutuhan sandang warga korban banjir menjadi terhambat dan terkadang ketidaksigapan

komando dilapangan turut mempengaruhi pertolongan pertama saat banjir salah satunya kurang sigapnya dalam evakuasi menggunakan perahu.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ae selaku Kasi Daltranstis peneliti menyimpulkan masih kurang koordinasi harmonis karena masih kurang menguntungkan bagi salah satu pihak contohnya untuk evakuasi korban banjir ke pengungsian masih kurang optimal dikarenakan orang lapangan kurang sigap dalam melakukan evakuasi. Selain itu warga kesulitan menjangkau tempat pengungsian dikarenakan bantuan perahu yang sangat minim karena perahu karet yang didatangkan Badan Penanggulangan Bencana Banjir terkadang datang terlambat. Dengan ini peneliti menyimpulkan kurang terjalin komunikasi yang cukup baik antara pihak orang lapangan di BPBD dan Kelurahan Andir.

Tujuan yang ditetapkan

Faktor tujuan yang ditetapkan dalam koordinasi Terry (2006: 126) dalam Hasibuan (2011: 17) tujuan adalah hasil yang diinginkan yang melukiskan skop yang jelas, serta memberikan arah kepada usaha-usaha seorang

manajer. Tujuan yang ingin dicapai selalu ditetapkan dalam suatu rencana, karena itu hendaknya tujuan ditetapkan jelas, realistis dan cukup menantang untuk diperjuangkan berdasarkan pada potensi yang dimiliki. Tujuan yang ditetapkan bisa jadi masih belum efektif, karena tidak terdapat ketidak efesienan tujuan yang ditetapkan.. Tujuan yang ditetapkan sebagai pelaksana sebuah koordinasi harus dapat mendukung dan menghasilkan tujuan yang telah diputuskan dengan baik.

Tujuan yang ditetapkan dari salah satu program terkait danau retensi yang belum mencapai target pencapaian dikarenakan masih ada proses pelelangan tanah oleh warga setempat. Dan pembuatan danau retensi ini berfungsi untuk menahan genangan air jika terjadi banjir. Menyusul dari pembuatan danau retensi di Cieunteung, Kelurahan Andir juga segera membuat beberapa danau retensi untuk pencegahan banjir. Dengan demikian, saat banjir terjadi, air dapat dengan cepat masuk ke kolam retensi dan langsung di pompa ke Citarum.

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Mela Selaku Bagian Umum dan Kepegawaian di Badan

Penanggulangan Bencana
mengatakan:

“Badan Penanggulangan Bencana sebagai koordinator memberikan perintah kepada instansi terkait yaitu Dinas PU Bina Marga, Dinas SDAPE, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pertasih, serta Kodim 0609. Namun khusus untuk banjir tahunan Kabupaten Bandung fungsi koordinasi di lapangan sering kali dilimpahkan kepada Pelaksana harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah.”

Dengan berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Mela Selaku Bagian Umum dan Kepegawaian peneliti menyimpulkan khusus untuk bencana tahap tanggap darurat seperti banjir, pada tahapan ini memiliki fungsi koordinasi dan perintah dimana saat dilapangan hanya mengacu pada badan Penanggulangan Bencana Daerah saja. Dalam melaksanakan kegiatan tanggap darurat berdasarkan prosedur sederhana Pra SOP tanggap darurat Badan Penanggulan Bencana.

Dalam hal ini peneliti juga mewawancari Bapak Uun selaku bagian urusan pelaksana harian Badan penanggulangan Bencana terkait tujuan yang ditetapkan dalam suatu rencana (plan) sesuai dengan SOP yang berlaku, beliau mengatakan :

“Seluruh proses Pra SOP Dilakukan dengan

mengedepankan prinsip-prinsip penanggulangan bencana sebagaimana tercantum dalam undang-undang penanggulangan bencana NO 24 tahun 2007 yaitu cepat dan tepat, prioritas, koordinasi, dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna. Ini sebagai acuan tujuan dari proses kerja badan penangulangan bencana.”

Dengan hasil wawancara dengan Bapak Uun selaku bagian Urusan Pelaksana harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah peneliti menyimpulkan bahwa ketika banjir terjadi, yang pertama dilakukan adalah assement atau perkiraan jumlah korban bencana. Assement ini dilakukan oleh tim BPBD yaitu TRC (Tim Reaksi Cepat). Kegiatan TRC ini berawal dari: pertama penyiapan tempat, alat komunikasi, dan sarana pendukung, kedua penataan peta bencana, deskripsi bencana, data-data korban, pengungsi, sumber daya, jadwal posko, upaya yang dilakukan dan kebutuhan yang mendesak. Ketiga, memberikan asitensi teknis bidang posko dan arus informasi dan arus informasi penanganan bencana serta pemantauan posko dilapangan.

Peneliti juga menanyakan terkait bagaimana tujuan yang di tetapkan agar terlaksana sesuai rencana atau Plan yang ada kepada Bapak Saef selaku Lurah di Kelurahan Andir, mengatakan:

“Untuk menggurangi banjir itu, perlu adanya kertabatan masyarakat mulai dari hulu sungai, tengah sungai sampai ke hilir sungai dan selain memperbaiki dan menata lingkungan juga harus dibarengi dengan pembuatan danau retensi dilokasi rawan genangan air di saat musim hujan. Pembuatan danau retensi itu harus menjadi skala prioritas pemerintah pusat dan dengan adanya danau retensi itu untuk mengurangi genangan air.”

Dengan Hasil wawancara dengan Bapak Sae di Kelurahan Andir peneliti menyimpulkan bahwa harus adanya kerja sama yang baik dengan berbagai komponen masyarakat, mulai dari hulu sungai, tengah sungai sampai ke hilir sungai dan keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan menjadi kunci penting. Masyarakat secara perlahan-lahan menjadi atau melestraikan lingkungan dari kerusakan. Dan ada daerah genangan yang menjadi sasaran pembuatan danau retensi agar bisa mengurangi genangan air bila banjir terjadi. Berdasarkan dengan ini hasil pihak Kelurahan dan Badan Penanggulangan bencana sudah berkoordinasi cukup baik dengan diadakannya danau retensi walaupun belum sepenuhnya selesai.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan pada Kelurahan Andir dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah disimpulkan bahwa:

1. Mekanisme unsur-unsur sinkronisasi yang teratur dipandang telah sesuai dengan teori Terry, dimana proses usaha untuk menyesuaikan, menyelaraskan kegiatan-kegiatan, tindakan-tindakan, unit-unit, sehingga diperoleh keserasian dalam pelaksanaan tugas atau kerja sudah berjalan baik. Namun dalam proses pelaksanaan kegiatan terkait unsur-unsur sinkronisasi yang teratur masih sangat membutuhkan partisipasi masyarakat. Hal ini menjadi motivasi bagi pihak Kelurahan Andir dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pembinaan oleh Kelurahan Andir dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
2. Dengan pengaturan waktu yang masih kurang dan belum memenuhi target penyelesaian program, pihak

- Kelurahan Andir sudah berusaha semaksimal mungkin untuk tetap menjalankan program yang sudah dibuat khususnya pembuatan danau retensi yang direncanakan tahun 2021 selesai. Selain Upaya pembuatan Danau Retensi jua dengan dibuatkannya program yang hampir selesai yaitu dengan adanya program pemulihan daerah aliran sungai Citarum yang dibantu TNI sektor 7 dengan dilakukannya pengedukan sampah di aliran Sungai guna untuk mempercepat air yang surut ke permukiman warga setempat.
3. Dalam hal Harmonis dalam fungsi koordinasi dapat disimpulkan bahwa unsur keharmonisan yang terjalin lewat komunikasi antar pihak Kelurahan Andir dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah belum berjalan dengan baik dikarenakan salah satu pihak kurang pengertian dalam penanganan program. Permasalahan-permasalahan yang terjadi berkaitan dengan tidak dilakukannya strategi koordinasi dengan baik. Karena di dalam koordinasi antar instansi, strategi-strategi seperti koordinasi antar instansi, strategi-strategi seperti koordinasi antisipatif dan koordinasi adaptif yang sangat penting untuk menekan adanya ego sektoral.
 - Ego sektoral yang ada masih cukup tinggi sehingga menyebabkan kesulitan untuk mensinergian koordinasi penanggulangan bencana dan berdampak kepada pelaksanaan penanggulangan bencana.
 4. Aspek tujuan yang ditetapkan di Kelurahan Andir belum maksimal terjadi hal ini dikarenakan adanya beberapa faktor penghambat seperti untuk penyelesaian Danau Retensi harus menunggu fungsi Curug Jompong dan Kolam Retensi Cieuteng selesai terlebih dahulu.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti memberikan saran bahwa:

1. Mekanisme fungsi koordinasi Kelurahan Andir guna dalam penanganan banjir membutuhkan pembinaan dan sosialisasi yang lebih terhadap masyarakat Kelurahan Andir khususnya tentang dampak bahayanya buang sampah ke aliran sungai Citarum. Pihak Kelurahan Andir dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah harus mampu mengajak masyarakat agar ikut serta membantu program yang dijalankan dan mengajak masyarakat

agar dapat berperan penting dalam berpartisipasi dalam proses penanganan banjir. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanganan banjir pihak Kelurahan Andir dan Pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah harus bisa menjadikan setiap program sebagai prioritas. Dan agar hal ini dilaksanakan dengan baik dan berjalan sesuai dengan yang diharapkan pihak Kelurahan Andir dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah harus berkoordinasi dengan baik khususnya dalam komunikasi agar bisa lebih fokus lagi dalam melakukan pembinaan kepada masyarakat dengan memanfaatkan anggaran dan sarana prasarana yang telah difasilitasi.

2. Langkah-langkah yang dilakukan untuk penanganan banjir yakni peran Kelurahan Andir dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah harus lebih dioptimalkan lagi dalam memberikan sosialisasi kepada warga setempat dengan peningkatan

koordinasi yang sesuai guna meningkatkan keberhasilan program penanganan banjir yang sesuai dengan harapan.

3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPB,D) Kabupaten Bandung dipimpin secara ex-officio oleh Sekda Kabupaten Bandung namun dalam pelaksanaan penanggulangan bencana khusus bencana banjir kewenangan sering dilimpahkan kepada Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung. Seharusnya kepala BPBD dalam hal ini Sekda lebih aktif dalam melakukan pengkoordinasian, agar intansi terkait dapat menjalankan kegiatan penanggulangan bencana dengan lebih optimal.
4. Permasalahan tidak efektifnya penanggulangan bencana banjir Kabupaten Bandung yang diakibatkan oleh belum optimalnya koordinasi yang ada, seharusnya diantisipasi lebih lanjut dengan penguatan dari sisi regulasi

yaitu dengan disahkannya Peraturan Daerah (Perda) Bupati Bandung yang mengatur tentang pelaksanaan koordinasi penanggulangan bencana. Dengan adanya perda khusus tentang pelaksanaan penanggulangan bencana dapat memperjelas tugas dan fungsi masing-masing instansi terkait di setiap tahapannya yaitu pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwilaga, Rendy, Alfian, Yani, & Ujud Rusdia. 2021. Sistem Pemerintahan Desa di Indonesia: Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Mengacu pada Perundang-undangan Periode 2014-2020. Bandung: Penerbit Manggu.
- Adiwilaga, Rendy, Alfian, Yani, & Ujud Rusdia, 2018. Sistem Pemerintahan Indonesia. Yogyakarta: Deepublish.
- Hasanah, Dera Izhar. (2020). Strategi Pemerintah Kecamatan terkait Optimalisasi wilayah Industri dalam Menunjang Pembangunan Fisik di Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung. *JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 4(2), 72-91. Retrieved from <https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/view/292>
- Rusdia, U. (2019). Manajemen Pemerintahan Daerah Menuju Indonesia Baru. *JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(3), 32-42. Retrieved from <https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/view/166>
- Ummah, Mustabsyrotul & Kusumah, R. I. (2020). Kajian Teoritis *Water Governance* untuk Pengelolaan Air di Indonesia. *JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 4(1), 29-51. Retrieved from <https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/view/259>